



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086 Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Disampaikan Oleh : DR. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
Nomor Anggota : A-457

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Kami Hormati,
Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI,
Saudari Menteri Keuangan beserta Jajaran,
serta Hadirin yang kami berbahagia. :

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat I atas Hasil Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Seraya kita memohon kiranya diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi NKRI dan mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara umum, Fraksi PKS menilai bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2022 masih belum memuaskan, sehingga berdampak kurang optimal terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1, bahwa: "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

Selanjutnya, dalam menyikapi Hasil Pembicaraan terkait Rancangan Undang-undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah masih bermasalah dalam menjaga kesinambungan fiskal. Hal ini dapat dicermati dari indikator keseimbangan primer tahun 2022 yang masih negatif, yaitu sebesar Rp74,08 triliun atau minus 0,38 persen dari PDB. Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara, melainkan berasal dari tambahan utang sehingga mengancam kesinambungan fiskal.
2. Fraksi PKS juga berpendapat adanya dampak rambatan dari defisit keseimbangan primer. Besarnya utang baru untuk pembayaran beban bunga utang akan menambah beban anggaran periode mendatang. Tahun 2022 pembayaran bunga utang mengambil porsi 16,94 persen dari total belanja pemerintah atau Rp386,34 triliun. Nilai tersebut meningkat signifikan dibandingkan pembayaran bunga utang tahun 2021 sebesar Rp343,49 triliun. Semakin meningkatnya beban bunga utang, efek bola saljunya menggerus porsi belanja lainnya.
3. Fraksi PKS berpendapat defisit anggaran tahun 2022 sebesar 2,4 persen dari PDB atau Rp460,42 triliun menandakan sektor fiskal yang masih rentan. Kecilnya defisit anggaran dibanding negara lain, tidak absolut menjadi penanda kuatnya fundamental fiskal. Adanya peningkatan harga komoditas ESDM yang bersifat temporer dan pemberlakuan "tax amnesti jilid II" menjadi latar belakang capaian penerimaan. Sedang di waktu yang sama tax ratio masih terbilang rendah, hanya mencapai 10,39 persen. Di mana standarnya untuk negara berkembang seperti Indonesia, setidaknya tax ratio harus berada di angka 15 persen.
4. Fraksi PKS berpendapat akumulasi utang hingga akhir 2022 sebesar Rp7.776,7 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,7 persen mengindikasikan kurangnya upaya pemerintah dalam pengendalian utang. Total utang senantiasa meningkat setiap tahunnya, penambahan utang tahun 2022 sebesar Rp867,87 triliun atau meningkat 12,6 persen setahun. Porsi utang pemerintah terhadap PDB telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh IMF dan International Debt Relief (IDR) dengan rasio sebesar 25-35 persen. Jumlah utang tersebut belum termasuk utang BUMN yang apabila diakumulasikan, maka jumlah utang jauh lebih besar lagi.
5. Fraksi PKS mencermati kenaikan utang setiap tahunnya belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan yang berkualitas. Penerbitan utang baru sebagian besar dialokasikan untuk menutup utang lama, baik sebagai sumber pembayaran pokok utang maupun beban bunga utang. Terlebih biaya yang harus dibayar dalam penerbitan utang tidaklah murah. Dengan *yield*-nya sangat tinggi sebesar 7,02 persen, kita harus menanggung biaya utang jauh lebih besar dari negara-negara lain yang memiliki rating setara atau bahkan di bawahnya.
6. Fraksi PKS berpendapat bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp86,72 triliun dalam rangka Program PEN dan non-PEN belum sesuai dengan tujuan. Dana PMN yang digelontorkan pemerintah belum memerhatikan risiko fiskalnya. Sebagai contoh, proyek KCJB yang membengkak akibat adanya peningkatan biaya (cost

overrun). Setelah tahun sebelumnya PT KAI sebagai pimpinan konsorsium BUMN menerima PMN sebesar Rp4,3 triliun untuk pemenuhan kebutuhan kekurangan setoran modal (base equity) kepada PT KCIC, maka pada 2022 kembali terdapat tambahan dukungan PMN sebesar Rp2,82 triliun. Proyek yang awalnya disepakati sebagai B to B dan tidak menggunakan APBN, karena kecerobohan perencanaan, pada akhirnya menjadi beban keuangan negara.

7. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan dalam penganggaran dan eksekusi program. Pada 2022 tercatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp130,56 triliun meningkat 26,01 persen. Pada 2022 pemerintah tidak memanfaatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), mengakibatkan akumulasi SAL membengkak menjadi Rp478,95 triliun. Semestinya pemerintah dapat dengan bijaksana dalam pengelolaan anggaran dalam kaitannya dengan SAL, alih-alih menerbitkan utang baru yang tidak murah.
8. Fraksi PKS berpendapat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 masih jauh dari target pertumbuhan yang ditetapkan 6 - 6,3 persen pada RPJMN 2020-2024. Sementara itu, enam asumsi makroekonomi lainnya meleset dan jauh dari target. Pertumbuhan ekonomi belum memuaskan dan setinggi negara-negara sekawasan. India tumbuh hingga 9,1 persen; Malaysia naik 8,7 persen; dan Filipina tumbuh 7,6 persen. Pertumbuhan ekonomi juga belum sepenuhnya berkualitas sehingga belum mampu mendorong peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat secara optimal. Kurang optimalnya pertumbuhan semakin menjauhkan harapan untuk bisa keluar dari *middle income trap*.
9. Fraksi PKS berpendapat benefit realisasi pertumbuhan ekonomi terkoreksi oleh tingginya angka inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,31 persen justru lebih rendah dari tingkat inflasi yang mencapai 5,5 persen. Inflasi energi dan bahan pangan yang melonjak sangat tinggi masing-masing 16,88 persen dan 5,59 persen, memberikan pukulan keras bagi daya beli rakyat dan menyebabkan kehidupan semakin sulit ditengah ekonomi yang belum pulih dari pandemi.
10. Fraksi PKS berpendapat bahwa target penurunan kemiskinan yang ditugaskan kepada pemerintah tidak tercapai pada tahun 2022. Akhir tahun 2022 (per September) angka kemiskinan mencapai 9,57 persen, jauh dari target APBN 2022 sebesar 8,5 - 9 persen. Jumlah rakyat miskin sebesar 26,36 juta jiwa masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Tingkat kemiskinan pun masih dibawah kondisi sebelum pandemi, sebesar 9,22 persen dan sangat jauh dari target RPJMN 2020-2024 menjadi 7 persen hingga 6,5 persen.
11. Fraksi PKS mendermati stagnasi penurunan kemiskinan juga sangat memprihatinkan. Pada 2014 penduduk miskin tercatat sebesar 11,3 persen hingga 2022 hanya berkurang 1,73 persen selama 8 tahun. Pemerintah juga perlu mewaspadaai masih terdapat 115 juta jiwa rakyat Indonesia yang rentan miskin menurut data Bank Dunia.
12. Fraksi PKS berpendapat turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional tahun 2022 (Agustus) menjadi 5,86 persen dari sebesar 6,49 persen tahun 2021 belum memadai, karena masih di atas rata-rata TPT sebelum pandemi di kisaran 5 persen. Fraksi PKS juga mencermati sulitnya anak muda mendapatkan pekerjaan telah menjadi keluhan rakyat secara luas.

13. Fraksi PKS berpendapat target penurunan kesenjangan tahun 2022 tidak tercapai. Pada target APBN 2022 dicanangkan rasio gini pada kisaran 0.376 sampai 0,378, sementara realisasinya hanya sebesar 0.381. Rasio gini juga tidak mengalami perbaikan dari posisi 0.381 tahun 2021. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan.
14. Fraksi PKS juga mencatat target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak tercapai. IPM yang mampu dicapai sebesar 72,91 dari target sebesar 73,41 – 73,46. Perlu diingat bahwa Pemerintah perlu mengejar target IPM pada RPJMN 2020-2024 sebesar 75,54.
15. Fraksi PKS mencermati bahwa belum ada yang istimewa dari masuknya Indonesia ke kelompok *upper-middle income countries*, karena GNI per kapita Indonesia hanya di posisi terbawah dari kelompok pendapatan tersebut. Pada sisi lain, belum terlihat dampak signifikan dari kenaikan posisi tersebut ke ekonomi nasional. Pada beberapa kajian menunjukkan bahwa semakin naiknya GNI per kapita maka semakin murah biaya utang suatu negara. Sementara itu bagi Indonesia, biaya penerbitan SBN masih sangat mahal. Dari sisi pertumbuhan pendapatan per kapita, pencapaian Indonesia juga tidak begitu tinggi. Tahun 2022, pendapatan per kapita Indonesia hanya mencapai 4.580 Dollar AS, jauh dibawah Malaysia yang mencapai 11.780 Dollar AS dan Thailand 7,230 Dollar AS.
16. Fraksi PKS berpendapat rasio perpajakan masih sangat rendah dimana tahun 2022 masih sebesar 10,41 persen sedikit meningkat dari 9,12 persen tahun 2021. Rasio perpajakan pernah mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2001 hingga 2008, dari sebelumnya 11,3 persen menjadi 13,3 persen terhadap PDB. Fraksi PKS juga menyoroti bahwa realita gap penerimaan perpajakan masih besar. Indonesia termasuk salah satu negara dengan gap penerimaan pajak terhadap PDB yang besar.
17. Fraksi PKS berpendapat meski terjadi tren peningkatan pada penerimaan perpajakan pada program hilirisasi, namun secara umum hal ini belum mampu menjawab adanya tren deindustrialisasi yang terjadi. Peningkatan yang masif dari penerimaan negara seperti yang disebutkan lebih diakibatkan ledakan komoditas. Fraksi PKS juga mendorong agar basis penerimaan perpajakan dapat terus diperluas agar mampu menangkap perkembangan aktivitas perekonomian riil, seperti ekonomi informal dan peningkatan ekonomi digital.
18. Fraksi PKS berpendapat deindustrialisasi memberikan pengaruh terhadap kinerja penerimaan perpajakan. Di sisi lain, pemerintah juga belum mampu menciptakan sumber penerimaan yang berkelanjutan. Kinerja penerimaan perpajakan dari sektor industri pengolahan secara tren tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain, akibat deindustrialisasi. Fraksi PKS juga memandang reformasi fiskal dan administrasi perpajakan belum berjalan optimal.
19. Di tengah upaya perluasan basis pajak dan meningkatkan penerimaan, Fraksi PKS berpendapat agar pemerintah tetap mengedepankan keadilan pungutan terutama bagi masyarakat kelas bawah. Terkait hal ini Fraksi PKS mendorong dan mendesak agar Pemerintah tidak mengenakan pungutan dalam bentuk apapun terhadap honor

relawan seperti kader posyandu, relawan jumentik, relawan Keluarga Berencana, Kader PLKB, Kader Pendamping Petani dan Nelayan, dan seterusnya.

20. Fraksi PKS juga mencermati rendahnya peranan belanja negara terhadap PDB disebabkan kualitas belanja yang belum kunjung membaik. Masih lemahnya peranan belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kualitas belanja belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Salah satu indikator yang menunjukkan situasi tersebut adalah kecenderungan belanja negara terealisasi di akhir tahun dan juga termasuk terjadinya belanja melebihi dari perencanaan. Fraksi PKS senantiasa mendorong Pemerintah agar meningkatkan kualitas belanja negara.
21. Fraksi PKS mencermati terkait dengan *mandatory spending*, yaitu alokasi Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan Anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Anggaran Pendidikan terealisasi hanya Rp480,26 triliun atau 77,30 persen dari anggaran sebesar Rp621,28 triliun. Fraksi PKS berpandangan bahwa dengan membandingkan antara realisasi Anggaran Pendidikan Rp480,26 triliun terhadap Belanja Negara Rp3.096,26 triliun maka realisasi Anggaran Pendidikan hanya 15,51 persen. Fraksi PKS berpandangan bahwa hal ini telah mencederai Amanat Konstitusi. Sementara itu Anggaran Kesehatan terealisasi Rp188,12 triliun atau 73,66 persen dari anggaran Rp255,39 triliun. Pemerintah harus mencermati alarm yang diberikan oleh Bappenas bahwa 9 dari 10 target pembangunan di bidang kesehatan terancam gagal dicapai.
22. Fraksi PKS juga mengingatkan Pemerintah agar dapat optimal dalam penggunaan belanja negara untuk penggunaan barang dan/ jasa di dalam negeri, termasuk produk-produk UMKM. Pemerintah juga perlu terus memperbaiki kinerja BUMN agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat tanpa harus menghilangkan kemampuan BUMN untuk dapat bersaing dan sustain dalam bisnis.
23. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas naiknya realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022, meskipun secara nominal dan persentase terbesar karena adanya peningkatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) atas royalti pertambangan yang mencapai Rp51,26 triliun atau 43,75 persen dari periode yang sama di tahun 2021. TKDD tahun 2022 meningkat 3,89 persen menjadi Rp816,23 triliun dari Rp785,71 triliun di tahun 2021.
24. Fraksi PKS mencermati realisasi Dana Transfer Khusus tahun 2022 sebesar Rp173,16 triliun atau 91,33 persen dari anggaran. Realisasi ini lebih kecil Rp11,47 triliun atau 6,21 persen lebih rendah dari realisasi tahun 2021. Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh terkait penurunan tersebut dan agar lebih optimal memberikan dampak bagi perekonomian rakyat di daerah.
25. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah agar melakukan Koordinasi dan Pemantauan secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP tahun 2022, bahkan termasuk dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih belum selesai penyelesaian tindak lanjutnya. Fraksi PKS juga mendesak Pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendapatkan Opini WDP atas Laporan Keuangan tahun 2022. Termasuk juga dengan 16 permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan yang sebelumnya sebanyak 27 permasalahan.

26. Fraksi PKS juga mengingatkan Pemerintah agar terus memperbaiki kinerja transparansi fiskal ke depan. Terdapat satu kriteria di Pilar analisis dan manajemen risiko fiskal dalam level basic, dan tujuh kriteria di Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya dalam level basic dan satu kriteria dalam level tidak dinilai (*not assessed*).

Hadirin yang Kami Muliakan,

Demikian Pendapat Fraksi PKS DPR-RI, dengan mengucapkan *Bismillahir-rahmannirrahiim*, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan *minderheid nota* (menerima dengan catatan)** hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, untuk dilanjutkan dalam tahapan pembahasan selanjutnya. Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu dalam mendengarkan pendapat Fraksi PKS, kami ucapkan terima kasih.

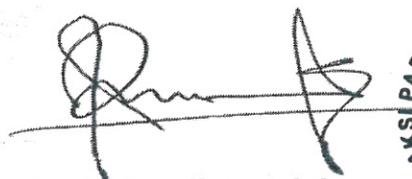
**Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, billahi taufiq wal hidayah,
Wassalaamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, 21 Shafar 1445 H

07 September 2022 M

**PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

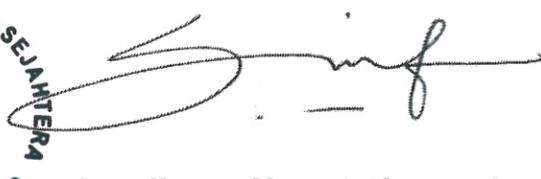
Ketua



Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.

No. Anggota: A-449

Sekretaris



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.PSi.T.

No. Anggota: A-427

